



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI  
KE PROVINSI JAWA TIMUR (SURABAYA – PASURUAN)  
DALAM RANGKA PENINJAUAN PROYEK JALAN TOL PROBOWANGI  
( PROBOLINGGO – SITUBONDO – BANYUWANGI)  
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020 - 2021  
23 - 25 NOVEMBER 2020**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**2020**

## I. PENDAHULUAN

### A. Dasar Hukum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), DPR RI dapat mengadakan kunjungan kerja sesuai bidangnya.

Komisi VI DPR RI yang membidangi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, BUMN, dan Investasi bermaksud akan melakukan kunjungan kerja ke daerah, guna mendapatkan gambaran dan penjelasan yang berhubungan dengan perkembangan kinerja Pemerintah Daerah, BUMN serta perkembangan sektor industri tertentu termasuk permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan pada masa persidangan II tahun sidang 2020 – 2021, Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Timur yaitu ke Kota Surabaya dan Kabupaten Pasuruan dalam rangka peninjauan proyek pembangunan Jalan Tol Probowangi (Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi) yang dilakukan pada tanggal 23 - 25 November 2020.

### B. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI

NO.	NO. ANGG.	NAMA	KETERANGAN
1	A-033	FAISOL RIZA	PIMP. / F.PKB
2	A-305	H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H, MM	F.PG
3	A-274	Ir. H.M. IDRIS LAENA	F.PG
4	A-311	DONI AKBAR, S.E.	F.PG
5	A-135	HENDRIK LEWERISSA, SH, LL.M	F.GERINDRA
6	A-128	SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH	F.GERINDRA
7	A-374	H. SUBARDI, SH, MH	F. NASDEM
8	A-21	Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos, M.Si	F.PKB
9	A-36	Ir. H. M. NASIM KHAN	F.PKB
10	A-542	H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.Si	F.PD
11	A-536	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	F.PD
12	A-416	Hj. NEVI ZUAIRINA	F.PKS
13	A-500	DAENG MUHAMMAD, SE, M.Si	F.PAN
14	A-506	ABDUL HAKIM BAFAGIH	F.PAN

### **C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja**

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021, Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Spesifik ke Jawa Timur (Surabaya – Pasuruan) pada tanggal 23 November 2020 sampai dengan 25 November 2020 dengan fokus tujuan untuk mengetahui kondisi aktual, realisasi, pelaksanaan termasuk permasalahan dalam proyek pembangunan jalan tol Probawang (Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi) termasuk dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan proyek jalan tol tersebut.

### **D. Objek Kunjungan Kerja**

Terkait dengan tujuan serta ruang lingkup Kunjungan Kerja spesifik tersebut tersebut, beberapa pihak yang akan terlibat dalam kunjungan spesifik ini antara lain:

1. PT Jasa Marga (Persero) Tbk pemegang konsesi Jalan Tol Probawang melalui PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi (disingkat PJB).
2. Beberapa BUMN pelaksana konstruksi pembangunan Jalan Tol Probawang antara lain :
  - a. PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
  - b. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
  - c. PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
  - d. PT PP (Persero) Tbk.
3. BUMN infrastruktur lainnya yaitu PT Hutama Karya (Persero) untuk mendapatkan masukan secara umum tentang pembangunan jalan tol, dan
4. PT Jasa Raharja (Persero) yang akan bertanggung jawab dalam hal asuransi kecelakaan lalu lintas di jalan tol.

## **II. INFORMASI KUNJUNGAN KERJA**

Secara garis besar pertemuan pada kunjungan kerja spesifik ini adalah untuk menggali tahap awal proses pembangunan jalan tol Probawang yang melintasi kabupaten Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi.

Proyek pembangunan jalan tol ruas Probolinggo - Situbondo - Banyuwangi atau Probawang di Provinsi Jawa Timur merupakan langkah peningkatan konektivitas Pulau Jawa bagian timur dengan wilayah lainnya. Proyek pembangunan jalan tol yang diperkirakan sepanjang 172 km ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi secara langsung baik kepada peningkatan ekonomi masyarakat Provinsi Jawa Timur maupun peningkatan nilai tambah ekonomi secara nasional.

Mitra kerja yang hadir (diwakili oleh PT Jasa Marga) menyampaikan hal-hal terkait dengan pembangunan Tol Probowangi sebagai berikut :

Nama Proyek	Jalan Tol Probowangi (Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi)
Panjang Jalan Tol	172 km yang terbagi menjadi 3 ruas antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Probolinggo-Paiton (Kab Probolinggo) sepanjang 30 km</li> <li>▪ Paiton-Bajulmati (Kabupaten Situbondo) sepanjang 111 km</li> <li>▪ Bajulmati-Ketapang (Kabupaten Banyuwangi) sepanjang 31 km</li> </ul>
Pemegang Konsesi	PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi (PJB) yang merupakan anak perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Pelaksana Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Paket 1 dikerjakan oleh KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.</li> <li>▪ Paket 2 dikerjakan oleh KSO PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Nindya Karya (Persero), dan PT Brantas Abipraya (Persero).</li> <li>▪ Paket 3 dikerjakan oleh KSO PT PP (Persero) Tbk dan Gorip Nanda Guna Group (Pihak Swasta).</li> </ul> <p>Seluruh mekanisme penunjukan dilakukan melalui tender.</p>
Progres Pembebasan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seksi Probolinggo-Paiton sebesar 21.81%.</li> <li>▪ Seksi Paiton-Besuki sebesar 5.41%</li> </ul> <p>Untuk seksi lainnya progres pembebasan lahan masih 0%</p>
Progress Konstruksi	0% atau belum mulai dilakukan pembangunan mengingat masih dalam proses pembebasan lahan.
Rencana Pembangunan	2020 - 2025 (Pentahapan Konstruksi)
Rencana Pengoperasian	Full operasional di tahun 2026
Biaya Konstruksi	Rp. 22,388,691 Juta

Biaya Investasi	Rp. 32,616,211 Juta
Masa Konsesi	50 Tahun
IRR on Project	2.4%
Lain-lain	Sepanjang ruas tol Probowangi dilengkapi 10 rest area dan 7 simpang susun.

Ruang lingkup pelaksanaan proyek jalan tol probowangi tergambar sbb:



Peta Ruang Lingkup  
Proyek Jalan Tol Probowangi

Dalam proyek Tol Probowangi, PJB telah melakukan sinergi mitra lokal/setempat dengan meningkatkan keterlibatan mitra setempat sebagai berikut :

1. PJB dan PT Jasa Marga Related Business (anak usaha PT Jasa Marga) akan mengalokasikan 30% ruang usaha pada rest area sepanjang ruas tol Probowangi untuk UMKM setempat.
2. PJB telah melakukan pembicaraan dengan Pemda setempat dan telah dihadiri pula oleh UMKM setempat yang diwakili oleh Pondok Pesantren masing-masing daerah.
3. Keterlibatan vendor maupun sumber daya lokal telah terakomodir dalam dokumen kontrak kerja konstruksi.

Pembangunan jalan tol Probowangi juga tetap memperhatikan kualitas jalan untuk menjamin keselamatan serta kenyamanan berkendara dengan langkah-langkah sbb :

1. Dalam tahap perencanaan dan pembangunan, selalu didasarkan kepada peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR dan instansi terkait lainnya.
2. Dalam pelaksanaan desain, PJB juga selalu melakukan asistensi dan konsultasi dengan Ditjen Bina Marga, BPJT dan Team Bantek yang ditunjuk, serta Departemen Perhubungan untuk hal-hal terkait manajemen lalu lintas pada saat operasional.

3. Dalam tahap pelaksanaan konstruksi, PJB telah menunjuk konsultan pengawas lapangan dan konsultan pengendali mutu independen yang akan menjaga serta menjamin pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan spesifikasi desain yang telah ditentukan.

Kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan proyek Jalan Tol Probongari sebagai berikut :

1. Tingkat kelayakan investasi sangat rendah. Beberapa faktor penyebab penurunan kelayakan investasi antara lain :
  - a. Perkiraan volume lalu lintas di bawah proyeksi rencana bisnis.
  - b. Laju inflasi yang tidak sesuai dengan proyeksi rencana bisnis.
  - c. Peningkatan biaya konstruksi akibat perubahan dari *basic design* ke rencana teknik akhir dimana terdapat struktur yang belum diakomodir dalam *basic design*.

Hal tersebut menyebabkan tingkat kelayakan (IRR) hanya sebesar 2.4% atau jauh dibawah *yield* perbankan sehingga dapat disimpulkan bahwa proyek ini tidak *feasible*.

2. Kondisi pandemi Covid-19 berdampak pada terhambatnya pelaksanaan koordinasi ataupun proses pembebasan lahan karena beberapa kegiatan pembebasan lahan yang membutuhkan pertemuan/pengumpulan masyarakat dalam jumlah banyak tidak dapat dilakukan sehingga proses pembebasan lahan mundur dari jadwal yang telah ditetapkan.
3. Dalam proses pembebasan lahan, JPB menggunakan dana kredit dari bank terlebih dahulu dengan bunga 9,25%. Namun demikian, belum ada komitmen dari Pemerintah apakah dana penggantian pembebasan lahan yang akan diberikan termasuk menanggung biaya bunga kredit bank (*cost of fund*) yang sebesar 9,25% atau tidak. Apabila *CoF* tidak ditanggung, maka perusahaan harus menanggung biaya tersebut sendiri yang akan membebani kinerja keuangan perusahaan.
4. Belum diterbitkannya surat perintah kerja. Seharusnya surat perintah kerja dapat segera diterbitkan agar proses konstruksi dapat berjalan minimal dilakukan penerbitan per seksi terlebih dahulu.

### III. DISKUSI DAN CATATAN PERTEMUAN

Berdasarkan hasil pertemuan dengan mitra kerja terkait dengan proyek Jalan Tol Probowangi (Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi), beberapa masukan yang disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR RI sebagai berikut :

1. Proyek pembangunan jalan tol Probowangi harus dikaji ulang kelayakannya mengingat kelayakan investasi proyek sangat kecil (2.4%) serta nilai investasi yang diperkirakan sebelumnya sebesar Rp 23 Triliun menjadi Rp 32 Triliun (membengkak sangat besar). Terkait dengan hal tersebut, mitra kerja (JPB dan BUMN Konstruksi) harus melakukan koordinasi dengan Pemerintah (Kementerian/Lembaga terkait) untuk meningkatkan kelayakan investasi tersebut.
2. Pembayaran dana pembebasan lahan oleh Pemerintah harus ikut mempertimbangkan bunga kredit bank (*cost of fund*) sehingga BUMN tidak terbebani dengan biaya bunga bank tersebut.
3. Pembangunan jalan tol harus memperhatikan kondisi setempat sehingga pembangunan jalan tol mampu memberikan dampak positif baik secara ekonomi maupun sosial kepada masyarakat setempat.
4. BUMN konstruksi harus meningkatkan profesionalitas, kualitas manajemen dan aspek permodalan. Sebagai contoh, BUMN harus tepat melakukan pembayaran terhadap mitra-mitra lokal sehingga tidak berdampak buruk pada citra perusahaan secara khusus dan BUMN secara umum.
5. Pembangunan jalan tol harus memperhatikan kualitas jalan. Jangan sampai anggaran yang sangat besar telah dikeluarkan namun kualitas tidak memadai.
6. Dalam proyek tol Probowangi harus diperhatikan beberapa aspek teknis sbb:
  - a. Exit tol harus diperhatikan dan diarahkan pada lokasi-lokasi pariwisata strategis yang dikembangkan oleh Pemda setempat.
  - b. Minimal 30% rest area diharapkan diberikan kepada UMKM dan pengusaha setempat.
  - c. Konstruksi jalan harap diperhatikan (khususnya kejutan/gelombang di jalan) sehingga dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan berkendara. Apabila akan ada kejutan jalan harap diberikan penanda sebelumnya.
  - d. Penempatan dan kualitas kamera harus diperhatikan sehingga dapat berkontribusi dalam penanggulangan kecelakaan dan kejahatan di ruas jalan tol.
  - e. Proyek kemitraan dengan mitra/kontraktor lokal harap dilaksanakan dengan baik. Pembayaran kepada mitra-mitra tersebut dilaksanakan secara tepat waktu.

- f. Pembebasan lahan harap dilaksanakan dengan baik sehingga tidak merugikan masyarakat setempat. Sosialisasi pembebasan lahan dilakukan secara intensif kepada masyarakat (berkoordinasi dengan Pemerintah setempat).
- g. Jasa Raharja sebagai pengelola asuransi kecelakaan lalu lintas harap meningkatkan kinerjanya sehingga pembayaran klaim asuransi kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan secara cepat dan tepat waktu.

Beberapa hasil diskusi tersebut, beberapa catatan akhir yang perlu ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari mitra kerja terkait pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Situbondo - Banyuwangi.
2. Komisi VI DPR RI meminta kepada mitra kerja untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Situbondo - Banyuwangi.
3. Komisi VI DPR RI meminta kepada mitra kerja untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pengusaha lokal khususnya sektor UMKM dalam pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Situbondo - Banyuwangi.
4. Komisi VI DPR RI meminta mitra kerja untuk melakukan pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Situbondo - Banyuwangi dengan berorientasi pada program pengembangan sektor pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Situbondo dan Banyuwangi.
5. Komisi VI DPR RI akan menyampaikan aspirasi dari mitra kerja terkait kendala yang dihadapi dalam proyek pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Situbondo - Banyuwangi pada saat rapat kerja dengan menteri terkait yaitu Menteri BUMN.



#### **IV. PENUTUP**

Demikian laporan kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur (Surabaya – Pasuruan) dalam rangka peninjauan proyek jalan Tol Probwangi (Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi) pada masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VI DPR RI.

Jakarta, 26 November 2020

Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI  
Ke Provinsi Jawa Timur  
(Surabaya – Pasuruan)

**FAISOL RIZA**

A-033

## **LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN**



**Tim Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI Bersama Mitra Kerja Dalam Rangka Peninjauan Proyek Jalan Tol Probwangi**



**Pemaparan Mitra Kerja Terkait Proyek Jalan Tol Probwangi Diwakili oleh Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.**



**Jalannya Diskusi Rapat  
Anggota Komisi VI DPR RI Menyampaikan Masukan Terkait  
Proyek Jalan Tol Probowangi**



**Jalannya Diskusi Rapat  
Anggota Komisi VI DPR RI Menyampaikan Masukan Terkait  
Proyek Jalan Tol Probowangi**